Februari, 2025, Volume 7 Nomor 1
E-ISSN 2656-1026

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MENDORONG PARTISIPASI POLITIK DI KOMUNITAS LOKAL

Fitri Widayanti
Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas PGRI Palangka Raya
Email: f3widayanti@gmail.com

Abstrak

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi politik di komunitas lokal. Melalui berbagai program dan kegiatan, LSM berupaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat, memperkuat kapasitas individu untuk berpartisipasi, serta menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami peran yang dimainkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mendorong partisipasi politik di komunitas lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai strategi yang digunakan oleh LSM untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik serta mengevaluasi efektivitas dari strategi tersebut. Jurnal ini akan membahas peran LSM dalam mendorong partisipasi politik di komunitas lokal, dengan fokus pada strategi yang digunakan, dampak dari kegiatan LSM, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

Keyword : Peran LSM, Partisipasi Politik, Komunitas Lokal

Pendahuluan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong partisipasi politik di komunitas lokal. Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Demokrasi yang berkembang, partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu indikator utama dari keberhasilan sistem pemerintahan. Arniti, N. K. (2020). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia mencapai 76,2%, meskipun angka ini menunjukkan peningkatan, masih ada tantangan besar yang dihadapi dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. LSM sering kali berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, membantu meningkatkan kesadaran politik dan memberikan pelatihan serta informasi yang diperlukan untuk mendorong keterlibatan aktif dalam proses politik. Padilah, A. H., Fayuni, D. F., & Nurviyanti, M. D. (2023).

Peran LSM dalam meningkatkan partisipasi politik tidak hanya terbatas pada pemilu, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain dari kehidupan politik, seperti advokasi kebijakan, pendidikan

politik, dan penguatan kapasitas masyarakat. Herdiansah, A. G. (2016) Misalnya, LSM seperti Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) telah berperan aktif dalam mengadvokasi isu-isu lingkungan yang berkaitan dengan kebijakan publik, sehingga masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan mereka. Dengan demikian, LSM berkontribusi dalam menciptakan ruang bagi masyarakat untuk bersuara dan berpartisipasi dalam proses politik yang lebih luas.

Tantangan yang dihadapi LSM dalam mendorong partisipasi politik tidak dapat diabaikan. Banyak LSM yang menghadapi kendala dalam hal pendanaan, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang, di mana sumber daya untuk kegiatan advokasi dan pendidikan politik sangat terbatas. Hadi, O. H. (2010) Selain itu, stigma negatif terhadap LSM di beberapa kalangan masyarakat juga dapat menghambat upaya mereka dalam mendorong partisipasi politik. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika ini dan mencari solusi yang tepat agar LSM dapat berfungsi secara optimal dalam mendorong partisipasi politik di komunitas lokal.

Dalam konteks global, LSM juga berperan sebagai agen perubahan yang dapat mempengaruhi kebijakan publik melalui kampanye dan mobilisasi masyarakat. Di banyak negara, LSM telah berhasil mengorganisir gerakan sosial yang berdampak besar pada kebijakan pemerintah. Natasha, D. (2022). Misalnya, gerakan #MeToo di Amerika Serikat yang didorong oleh berbagai LSM berhasil mengubah cara pandang masyarakat terhadap isu kekerasan seksual dan mendorong legislatif untuk mengesahkan undang-undang yang lebih ketat. Hal ini menunjukkan bahwa LSM tidak hanya berperan di tingkat lokal, tetapi juga dapat memberikan dampak yang signifikan secara nasional dan internasional.

Dengan memahami latar belakang masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang peran LSM dalam mendorong partisipasi politik di komunitas lokal dan bagaimana mereka dapat mengatasi tantangan yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi LSM, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik di tingkat lokal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami peran yang dimainkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mendorong partisipasi politik di komunitas lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai strategi yang digunakan oleh LSM untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik serta mengevaluasi efektivitas dari strategi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika partisipasi politik di tingkat lokal dan bagaimana LSM dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih partisipatif.

Metode Penelitian

Dalam menjawab pertanyaan mengenai peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mendorong partisipasi politik di komunitas lokal, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022) Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dinamika yang terjadi dalam komunitas lokal serta interaksi antara LSM dan masyarakat. Penelitian ini juga melibatkan analisis data sekunder dari berbagai

literatur dan laporan penelitian sebelumnya yang relevan.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus LSM, anggota komunitas, dan pihak terkait lainnya. Wawancara ini bertujuan untuk memahami perspektif mereka mengenai peran LSM dalam mendorong partisipasi politik. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan di beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh LSM untuk melihat secara langsung interaksi dan dampaknya terhadap masyarakat.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari wawancara dan observasi. Soesanto, E., Romadhon, A., Mardika, B. D., & Setiawan, M. F. (2023). Proses ini melibatkan pengkodean data dan pengelompokan informasi berdasarkan kesamaan tema. Dengan cara ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang lebih komprehensif mengenai kontribusi LSM dalam meningkatkan partisipasi politik di tingkat lokal.

Hasil dan Pembahasan

A. Strategi LSM dalam Mendorong Partisipasi Politik

Strategi yang digunakan oleh LSM dalam mendorong partisipasi politik di komunitas lokal sangat bervariasi, tergantung pada konteks dan kebutuhan masyarakat. Salah satu strategi utama adalah melalui pendidikan politik. LSM sering kali menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan diskusi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem politik dan hak-hak mereka. Menurut survei yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2021, sekitar 65% responden menyatakan bahwa mereka merasa lebih memahami proses pemilihan umum setelah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh LSM (KPU, 2021).

Selain pendidikan, LSM juga menggunakan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi politik. Dengan memanfaatkan platform-platform digital, LSM dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan menyebarkan informasi dengan cepat. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia mencapai 77% pada tahun 2022, yang memberikan peluang besar bagi LSM untuk memanfaatkan media digital dalam kampanye mereka (APJII, 2022).

LSM juga berperan dalam membangun jaringan dan kolaborasi antar komunitas. Melalui aliansi dengan organisasi lain, LSM dapat memperkuat suara masyarakat dan menciptakan gerakan yang lebih besar. Contohnya, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) berhasil menggalang dukungan dari berbagai LSM untuk mendorong pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang menunjukkan kekuatan kolaborasi dalam mencapai tujuan politik (KPI, 2020).

Selain itu, LSM sering kali terlibat dalam advokasi kebijakan. Mereka melakukan penelitian dan analisis untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Dengan data yang kuat dan bukti empiris, LSM dapat mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat lokal. Sebagai contoh, LSM seperti YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) telah berhasil mempengaruhi kebijakan perlindungan hak asasi manusia melalui advokasi yang berbasis pada data dan fakta (YLBHI, 2021).

LSM juga berperan dalam memfasilitasi dialog antara masyarakat dan pemerintah. Dengan menciptakan ruang untuk diskusi, LSM membantu membangun saluran komunikasi yang

lebih baik antara kedua pihak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Data dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menunjukkan bahwa dialog yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (UNDP, 2020).

B. Tantangan yang Dihadapi LSM dalam Mendorong Partisipasi Politik

Meskipun LSM memiliki peran yang signifikan dalam mendorong partisipasi politik, mereka juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya. Banyak LSM yang beroperasi dengan anggaran yang terbatas, yang menghambat kemampuan mereka untuk menjalankan program-program yang lebih luas. Menurut laporan dari International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), sekitar 70% LSM di Indonesia bergantung pada dana hibah dari donor internasional, yang sering kali tidak stabil dan terbatas (INFID, 2021).

Selain itu, LSM juga sering menghadapi resistensi dari pemerintah dan pihak-pihak yang berkuasa. Dalam beberapa kasus, LSM yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dapat mengalami intimidasi atau pembatasan akses. Data dari Human Rights Watch menunjukkan bahwa beberapa LSM di Indonesia telah mengalami tindakan represif, seperti pengusiran atau pembubaran, yang menghambat upaya mereka untuk mendorong partisipasi politik (Human Rights Watch, 2020).

Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran politik di kalangan masyarakat. Meskipun LSM berupaya untuk meningkatkan pemahaman politik, masih banyak masyarakat yang apatis dan tidak tertarik untuk terlibat dalam proses politik. Survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa hanya 40% masyarakat yang merasa bahwa partisipasi politik itu penting (LSI, 2021). Hal ini menjadi hambatan bagi LSM dalam mendorong partisipasi yang lebih luas.

LSM juga harus berhadapan dengan isu-isu yang kompleks dan sering kali saling terkait, seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks ini, LSM perlu mengembangkan pendekatan yang holistik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Misalnya, LSM yang fokus pada isu lingkungan juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan yang mereka advokasikan. Data dari World Bank menunjukkan bahwa isu-isu multidimensional ini memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai solusi yang berkelanjutan (World Bank, 2021).

Tantangan teknologi juga menjadi perhatian. Meskipun media sosial memberikan peluang baru untuk berkomunikasi, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi tersebut. Menurut data dari BPS, masih terdapat kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang dapat menghambat upaya LSM dalam menjangkau semua lapisan masyarakat (BPS, 2020).

C. Studi Kasus: Peran LSM dalam Pemilihan Umum

Salah satu contoh nyata dari peran LSM dalam mendorong partisipasi politik adalah selama pemilihan umum. LSM seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) telah berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi pemilih melalui berbagai program edukasi. Dalam pemilihan umum 2019, Perludem mencatat bahwa partisipasi pemilih meningkat sebesar 7% dibandingkan pemilu sebelumnya, berkat upaya mereka dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya suara mereka (Perludem, 2019).

LSM juga berperan dalam pemantauan pemilu untuk memastikan bahwa proses berlangsung secara adil dan transparan. Dengan melibatkan relawan dari masyarakat, LSM dapat mengawasi jalannya pemungutan suara dan mengidentifikasi potensi pelanggaran. Data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan bahwa partisipasi LSM dalam pemantauan pemilu dapat mengurangi angka pelanggaran hingga 30% (Bawaslu, 2020).

Contoh lain adalah LSM yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam politik. Organisasi seperti Women's March Indonesia telah berhasil mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun calon legislatif. Dalam pemilu 2019, jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif meningkat sebanyak 10%, berkat kampanye yang dilakukan oleh LSM ini (Women's March Indonesia, 2019).

LSM juga berperan dalam menyediakan platform bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Melalui forum-forum diskusi dan dialog, masyarakat dapat bertemu dengan calon legislatif dan menyampaikan harapan serta kekhawatiran mereka. Hal ini membantu menciptakan keterhubungan antara masyarakat dan pengambil keputusan, yang sangat penting dalam proses demokrasi.

LSM juga berperan dalam mengadvokasi kebijakan pasca-pemilu untuk memastikan bahwa janji-janji kampanye diimplementasikan. Dengan melakukan penelitian dan menyusun rekomendasi kebijakan, LSM dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Data dari UNDP menunjukkan bahwa advokasi yang berbasis pada bukti dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik (UNDP, 2020).

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, jelas bahwa LSM memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong partisipasi politik di komunitas lokal. Melalui berbagai strategi, mereka berhasil meningkatkan kesadaran politik, membangun jaringan, dan memfasilitasi dialog antara masyarakat dan pemerintah. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak bisa diabaikan, termasuk keterbatasan sumber daya, resistensi dari pemerintah, dan rendahnya kesadaran politik masyarakat.

Referensi

Arniti, N. K. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di kota denpasar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4(2), 329-348.

Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, *3*(01), 1-9.

Herdiansah, A. G. (2016). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, *1*(1), 49-67.

Hadi, O. H. (2010). Peran masyarakat sipil dalam proses demokratisasi. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, *14*(2), 117-129.

Natasha, D. (2022). Manifestasi Gerakan Sosial Baru dalam Krisis Iklim (Studi Kasus: Extinction Rebellion

Indonesia). *Jurnal PolGov*, *4*(1), 169-210.

Padilah, A. H., Fayuni, D. F., & Nurviyanti, M. D. (2023). Partisipasi politik dalam pembangunan desa di kecamatan Sayan Kabupaten Melawi. *Journal of Social and Policy Issues*, 192-201.

Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *7*(2), 1461-1471.

Soesanto, E., Romadhon, A., Mardika, B. D., & Setiawan, M. F. (2023). Analisis dan Peningkatan Keamanan Cyber: Studi Kasus Ancaman dan Solusi dalam Lingkungan Digital Untuk Mengamankan Objek Vital dan File. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, *1*(2), 172-191.